

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu mengembangkan dan menikmati kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, peran seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan.

Kemiskinan sebagai masalah global, tidak dapat hanya diselesaikan oleh sepihak pemerintah lewat berbagai kebijaksanaan pembangunan, Tetapi juga harus menjadi tanggung jawab bersama bagi semua pelaku pembangunan termasuk masyarakat itu sendiri. Menurut hemat penulis Memang ironis bahwa walaupun kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang sudah tidak asing lagi dalam penglihatan kita, tetapi pemahaman terhadapnya dan upaya mengentaskannya belum menunjukkan hasil yang menggembirakan baik dilakukan oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak pribadi itu sendiri.

Selain itu Miller berpendapat bahwa “kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan sekitar daripada lingkungan keluarga. Pengertian ini dinamakan kemiskinan *relatif*. Kemiskinan relatif diperkirakan dengan memperhatikan masyarakat golongan berpendapatan rendah dari suatu pola pendapatan masyarakat secara keseluruhan”.¹

¹ Lihat Miller dalam Usman Kaharu, (2004) *Ekonomi Pembangunan*, Btm Nurul Jannah; hl.

Manusia memiliki berbagai kebutuhan yang memerlukan pemenuhan sesegera mungkin. Salah satu kebutuhan dimaksud, yaitu kebutuhan dasar, dan oleh karena itu kebutuhan dasar ini berkaitan dengan hidup dan kelangsungan hidup (survival) manusia. Apabila kebutuhan dasar tersebut tidak dapat dipenuhi segera, maka akan menimbulkan permasalahan pada manusia, dimana manusia tersebut tidak mampu melaksanakan fungsi sosialnya, atau manusia tersebut tidak sejahtera secara sosial.²

Penanggulangan kemiskinan perlu menjadi agenda kebijakan penting karena secara moral pemerintah harus mengemban tanggung jawab sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 yang secara eksplisit memberi amanat kepada pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negara.³

Pada umumnya masyarakat mendambakan kondisi ideal yang merupakan tatanan kehidupan yang diinginkannya. Kondisi tersebut menggambarkan sebuah kehidupan yang disitu kebutuhan-kebutuhan dapat terpenuhi, suatu kondisi yang tidak lagi diwarnai kekhawatiran hari esok, kehidupan yang memberi iklim yang kondusif guna aktualisasi diri dan untuk terwujudnya proses relasi sosial yang berkeadilan. Oleh sebab itu, apabila kehidupan saat sekarang belum memenuhi kondisi ideal tersebut, selalu ada dorongan untuk melakukan usaha guna mewujudkan. Demikian juga apabila terdapat realitas yang dianggap menghambat tercapainya kondisi ideal tersebut, akan mendorong usaha untuk mengubah dan memberbaikinya. Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan terutama dapat diwujudkan dengan mengusahakan agar semakin banyak

² Sosiokonsepsia 206 Vol. 17, No. 02 2012

³ Jurnal AKK, Vol 1 No 1, September 2012.

kebutuhan-kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi. Di samping itu, perlu pula dipahami bahwa kebutuhan yang harus dipenuhi tidak semata-mata kebutuhan fisik, melainkan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan manusia seutuhnya. Dalam rangka pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut, pada dasarnya setiap masyarakat mempunyai sumber daya (resources) yang dapat dimanfaatkan. Walaupun demikian, perlu dipahami bahwa sumber daya tadi lebih bersifat sebagai potensi dan kemungkinan. Sebagai potensi dan kemungkinan, sudah barang tentu sumber daya pembangunan tadi tidak secara otomatis dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Seberapa jauh potensi dan kemungkinan tersebut secara aktual dan efektif berfungsi dalam peningkatan taraf hidup masyarakat akan sangat ditentukan oleh sikap dan tanggapan masyarakatnya.⁴

Dengan demikian, salah satu aspek dari proses pembangunan masyarakat adalah meningkatkan sikap dan tanggapan masyarakat terhadap sumber daya pembangunan yang tersedia sehingga sumber daya tersebut lebih mempunyai daya guna dalam kehidupan. Dalam kaitannya dengan sumber daya dan kebutuhan ini pembangunan masyarakat dapat diartikan sebagai proses yang berisi usaha untuk menciptakan hubungan yang serasi antara sumber daya yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat sehingga tercapai kondisi kehidupan yang lebih baik atau tercapai kondisi kesejahteraan yang semakin meningkat.

⁴ Lihat Wirjosumarto Dalam Soetomo (2009) *Pembangunan masyarakat*, pustaka pelajar, : yogyakarta hl. 179

Kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal menjadi problematika universal yang di hadapi oleh hampir seluruh Negara berkembang dewasa ini. Perumahan adalah salah satu masalah penting pemerintah yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan politik. Pertambahan jumlah penduduk yang sangat pesat menuntut ketersediaan rumah serta sarana dan prasarana lainnya. Sementara di lain pihak, terbatasnya anggaran pemerintah untuk penyediaan perumahan menjadi antitesa usaha tersebut.

Idealnya, sebuah rumah yang layak huni merupakan syarat mutlak yang harus di wujudkan oleh setiap keluarga sebagai penghuninya. Namun dalam prakteknya, keterbatasan ekonomi dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang rumah yang layak huni menyebabkan masih banyak rumah kumuh dengan sanitasi yang buruk yang dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Memiliki rumah layak huni yang berada di lingkungan yang sehat merupakan dambaan semua orang. Mereka menginginkan memiliki rumah untuk tinggal dengan nyaman, terlindung dari sengatan matahari, guyuran air hujan, dan debu. Di rumah itu mereka dapat berkumpul dan menjalin komunikasi dengan keluarga, serta membangun masa depan. Namun, karena keterbatasan ekonomi tidak semua orang, khususnya warga yang berekonomi lemah, mampu memperbaiki rumahnya.

Menurut Medgley kebutuhan tempat tinggal (rumah) merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, yang sekaligus sebagai unsur di dalam konsep kesejahteraan sosial.⁵

⁵ <http://promosinet.com/hiburan/acara-tv/2073-reality-show-renovasi-rumah-tinggal-dan-budaya-berhuni-masyarakat-kurang-mampu>.

Tujuan pemerintah dalam hal pemberian bantuan rumah tersebut, mengetahui sejauh mana program ini dilaksanakan dan benar-benar dapat membantu meringankan kesulitan keluarga miskin untuk memiliki rumah yang layak untuk di huni. Selain itu juga pemerintah berharap program ini untuk bisa untuk merangsang pola pikir, perilaku dan pola hidup masyarakat agar supaya mereka bisa berusaha dan bisa keluar dari masalah yang dihadapi. Peilaku dan pola hidup yang disebutkan disini adalah yang menentukan masyarakat itu berubah kehidupannya atau tidak.

Tapi kenyataan yang terjadi dilapangan tidak mampu mencapai target yang sesuai dengan apa diharapkan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini bisa kita lihat dalam masyarakat yang menerima bantuan rumah layak huni yang ada di Desa Hutamoputih kec. Dengilo kab. Pohuwato yang menyangkut dengan pola kehidupan mereka.

Berbicara mengenai pola hidup masyarakat dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk masyarakat di suatu desa diduduki oleh kaum petani yang merupakan pencaharian utama mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta sebagian untuk kepentingan sosial. Selain itu juga di ketahui pula bahwa biasanya dalam suatu desa pola hidup mereka selain dari petani, perkebunan dan sebagian sebagai tukang kayu.

Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan salah satu permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia yang memerlukan perhatian semua pihak. Jumlah mereka masih cukup besar, tersebar di lokasi yang relatif sulit dijangkau, dan pada umumnya jauh tertinggal secara ekonomis maupun sosial budaya dibandingkan warga

negara lainnya. Komunitas Adat terpencil menghadapi berbagai ketertinggalan dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar hidup sebagai manusia. Ketergantungan pada alam menjadi ciri khas kehidupan mereka, walaupun demikian kehidupan KAT tidak lagi berpindah-pindah mereka sudah menetap pada lokasi tertentu yang sudah berlangsung lama.

Di Desa Hutamoputih Kec. Dengilo Kab. Pohuwato tahun 2011 masyarakatnya menerima bantuan rumah layak huni dari Program penanggulangan kemiskinan melalui program komunitas adat terpencil. Program ini di khususkan untuk komunitas adat terpencil (KAT) itu sendiri, hal ini dilakukan oleh pemerintah agar supaya masyarakat atau komunitas adat terpencil bisa menikmati rumah yang layak huni dan diharapkan bisa mengubah pola pikir mereka untuk berubah dari keadaan yang sebelumnya. Di Desa Hutamoputih kecamatan Dengilo kabupaten Pohuwato itu sendiri tidak ada masyarakat yang dimanakan komunitas adat terpencil (KAT) maka bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat miskin yang tidak mampu membangun rumah yang layak huni. Hal tersebut di tempuh oleh pemerintah Desa untuk membantu masyarakat yang tidak mampu membangun rumah layak huni. Setelah itu masyarakat penerima bantuan rumah layak huni tersebut di sebut oleh pemerintah masyarakat komunitas adat terpencil (KAT).

Di Desa hutamoputih Kec. Dengilo Kab. Pohuwato dari jumlah penduduk sebanyak 1.298 jiwa masyarakat yang menerima bantuan rumah layak huni dari porgram pemerintah penanggulangan kemiskinan melalui program komunitas adat terpencil (KAT) dari data yang diperoleh dari perintah Desa yaitu sebanyak 100 KK.

Alasanya karena masyarakat yang menerima adalah mereka yang tidak mampu membiayai sendiri dalam hal pembangunan rumah yang layak huni dengan penghasilan yang pas-pasan hanya dapat memenuhi kebutuhan mereka setiap harinya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana pola kehidupan masyarakat penerima bantuan rumah layak huni dari penanggulangan kemiskinan melalui program KAT.?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Untuk Bagaimana pola kehidupan masyarakat penerima bantuan rumah dari penanggulangan kemiskinan melalui program KAT.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana penanggulangan kemiskinan melalui program komunitas adat terpencil (KAT) di Desa Hutamoputih Kec. Dengilo Kab. Pohuwato.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

- 1.4.1 Secara Teoritis ; penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah kajian tentang penanggulangan kemiskinan melalui program komunitas adat terpencil (KAT)
- 1.4.2 Secara Praktis ; penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran bagi Mahasiswa dalam pengembangan ilmu pengetahuan;
- 1.4.3 Bagi Peneliti ; Kegiatan penelitian ini dapat menjadi wahana untuk menambah pengetahuan dibidang penelitian dan juga mendapat informasi baru tentang

penanggulangan kemiskinan melalui program komunitas adat terpencil (KAT) di
Desa Hutamoputih Kec. Dengilo Kab. Pohuwato.